

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
TAHUN ANGGARAN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 sesuai dengan target waktu yang ditentukan.

Laporan ini merupakan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja yang menggambarkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BNNP Sumatera Barat dalam penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di wilayah Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2020. Hal ini dimaksud bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan bertanggung jawab kepada publik yang diukur secara kualitatif dan kuantitatif sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja BNNP Sumatera Barat tahun 2020 merupakan Laporan Kinerja tahun keempat dalam periode RPJMN tahun 2020 - 2024. Dalam laporan ini disajikan tingkat pencapaian sasaran strategis BNNP Sumatera Barat sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNNP Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021.

Secara umum BNNP Sumatera Barat berupaya keras untuk melakukan pencegahan, rehabilitasi terhadap korban penyalahguna narkoba dan pemberantasan yang bertujuan untuk memutus rantai peredaran narkoba yang terus meningkat setiap tahunnya.

Diharapkan melalui laporan ini dapat memberi gambaran objektif tentang Kinerja BNNP Sumatera Barat tahun 2021 sekaligus menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pada tahun mendatang, serta dapat menjadi media pertanggungjawaban dan juga menjadi media evaluasi untuk menilai Kinerja BNNP Sumatera Barat secara keseluruhan.

Demikian, semoga Allah SWT meridhoi usaha kita semua. Amin

Padang, Januari 2023
**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI SUMATERA BARAT**



Drs. SUKRIA GAOS.,MM
BRIGADIR JENDERAL POLISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian adalah:

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN.
- b. Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Program Kegiatan tersebut di implementasikan melalui 10 (sepuluh) sasaran strategis dan 16 (enam belas) Indikator Kinerja Kegiatan. Dari 16 (enam belas) indikator kinerja kegiatan tersebut dapat dikelompoknya sebagai berikut:

1. Capaian sesuai target sebanyak 8 indikator kinerja kegiatan
2. Capaian melebihi target sebanyak 5 indikator kinerja kegiatan
3. Capaian di bawah target sebanyak 4 indikator kinerja kegiatan

Berdasarkan uraian capaian kinerja BNN Proovinsi Sumatera Barat Tahun 2022, menggambarkan bahwa BNNP Sumatera Barat telah melaksanakan tugas dan fungsi yang diberikan dalam pengembangan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Dalam pelaksanaannya, BNN Provinsi Sumatera Barat melakukan berbagai upaya untuk mencapai sasaran strategis tersebut melalui Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Rehabilitasi dan Bidang Pemberantasan. Selain itu dukungan dan peran serta masyarakat juga sangat berperan dalam pencapaian kinerja di BNN Provinsi Sumatera Barat.

Capaian kinerja ini tidak lepas dari permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas.

Pagu anggaran BNN Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 untuk mendukung program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) adalah sebesar **Rp. 14.449.818.000,-** dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar **Rp. 14.132.476.464,-** atau sebesar **97,80 %** dari total anggaran.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Dasar Hukum	3
C. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Serta Struktur	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis / Rencana Program Kerja	7
B. Rencana Kinerja Tahunan	7
C. Perjanjian Kinerja	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Analisis Capaian Sasaran.....	15
B. Akuntabilitas Keuangan	48
BAB IV PENUTUP	50

Lampiran

Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perjanjian Kinerja BNNP Sumatera Barat TA. 2022.....	12
Tabel 2	Realisasi Capaian Kinerja BNNP Sumatera Barat Tahun 2022.....	15
Tabel 3	Rekapitulasi Perhitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (DEKTARI) Tahun 2022.....	18
Tabel 4	Rekapitulasi Perhitungan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (DEKTARA) di Lingkungan BNNP Sumatera Barat TA. 2022.....	21
Tabel 5	Rekapitulasi Indeks Kemandirian Partisipasi di Lingkungan BNNP Sumatera Barat TA. 2022.....	24
Tabel 6	Kawasan/ Wilayah Rawan Narkoba yang Diintervensi Program Pemberdayaan Alternatif TA. 2022.....	25
Tabel 7	Petugas Penyelenggara Layanan IBM yang Terlatih BNNP dan BNNKab/Kota TA. 2022.....	27
Tabel 8	Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Provinsi Sumatera Barat TA. 2022.....	31
Tabel 9	Hasil Survey Kajian Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi di BNNP Sumatera Barat dan jajarannya TA. 2022.....	33
Tabel 10	Jumlah Tahanan Masuk dan Tahanan Keluar pada Proses Penyidikan TA. 2022.....	35
Tabel 11	Jumlah Barang Bukti Narkotika pada Proses Penyidikan 2022.....	37
Tabel 12	Jumlah Barang Bukti Non Narkotika pada Proses Penyidikan 2022.....	37
Tabel 13	Penghitungan Nilai Kinerja Anggaran BNNP Sumatera Barat TA. 2022.....	46
Tabel 14	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Sumatera Barat dan BNNKab/kota Tahun 2022	48
Tabel 15	Alokasi Anggaran BNNP Sumatera Barat TA. 2022.....	49
Tabel 16	Alokasi Anggaran BNNP Sumatera Barat TA. 2022 Berdasarkan Sumber Dana	49

LAMPIRAN

- Lampiran 1 Perjanjian Kinerja BNNP Sumatera Barat**
- Lampiran 2 Perjanjian Kinerja BNN Kota Payakumbuh**
- Lampiran 3 Perjanjian Kinerja BNN Kota Sawahlunto**
- Lampiran 4 Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Solok**
- Lampiran 5 Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Pasaman Barat**

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah termasuk BNN wajib mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Hal ini sejalan dengan upaya reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh seluruh Kementerian dan Lembaga, yaitu mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan berwibawa serta memiliki kinerja yang baik (Good Governance).

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang berkembang begitu pesat dan sangat mengkhawatirkan merupakan kejahatan yang bersifat lintas negara (*transnational crime*), suatu kejahatan yang terorganisir (*organized crime*) dan terus berkembang serta menimbulkan kerugian yang sangat besar terutama dari segi kesehatan, sosial ekonomi, keamanan dan mengakibatkan hilangnya satu generasi di masa depan. Peredaran Narkoba saat ini sudah merambah ke seluruh wilayah dan berbagai lapisan masyarakat yang mana sasaran dari peredaran narkoba bukan hanya tempat-tempat hiburan malam tetapi juga ke daerah pemukiman, kampus, sekolah-sekolah, rumah kos dan bahkan lingkungan rumah tangga.

Permasalahan ini memerlukan penanganan yang serius dan kerjasama dari seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara. Untuk menanggulangi permasalahan narkoba tersebut, BNNP Sumatera Barat melakukan berbagai upaya melalui Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Rehabilitasi dan Pemberantasan. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, BNN melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan berbagai kegiatan melalui Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Rehabilitasi, dan Bidang Pemberantasan. Selain itu juga diperlukan komitmen bersama para aparat penegak hukum, Aparatur Sipil Negara dan seluruh komponen masyarakat dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Provinsi Sumatera Barat.

Terdapat sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan prioritas penanganan oleh BNN Provinsi Sumatera Barat, dimana permasalahan-permasalahan ini dapat menjadi hambatan dalam upaya

pencapaian tujuan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah provinsi Provinsi Sumatera Barat adapun sejumlah permasalahan tersebut adalah:

a. Keadaan Geografis

Provinsi Sumatera Barat secara astronomis terletak antara 0o 54' Lintang Utara dan 3o 30' Lintang Selatan dan antara 98o 36' - 101o 53' Bujur Timur. Sumatera Barat terletak di pesisir barat bagian tengah pulau Sumatera dan mempunyai luas wilayah sekitar 42,01 ribu Km². Provinsi Sumatera Barat berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu dan Samudera Indonesia. Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 19 Kabupaten/Kota. Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki wilayah terluas, yaitu 6,01 ribu Km² atau sekitar 14,31 % dari luas Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan Kota Padang Panjang, memiliki luas daerah terkecil, yakni 23,0 Km² (0,05%). Provinsi Sumatera Barat memiliki 218 pulau yang tersebar di 7 Kabupaten/ Kota yaitu Kab. Kepulauan Mentawai (113 pulau), Kab. Pesisir Selatan (48 pulau), Kab. Padang Pariaman (1 pulau), Kab. Agam (2 pulau), Kab. Pasaman Barat (26 pulau), Kota Padang (21 pulau), Kota Pariaman (4 pulau) dan yang berada di Wilayah Provinsi Sumatera Barat (3 pulau).

Jalur laut menjadi jalur favorit penyelundupan narkoba ke Indonesia dengan menggunakan kapal penumpang, kapal tradisional, atau speedboat, para pengedar narkoba beraksi di perairan Indonesia. Narkoba masuk ke Provinsi Sumbar (85%) melalui jalur laut selebihnya udara dan daratan lewat perbatasan-perbatasan. Di provinsi Sumatera Barat narkoba masuk melalui sepanjang daerah pesisir pantai (Tiku, Pariaman, Padang, Painan, Kambang dan Kepulauan Mentawai).

b. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Kebutuhan sumber daya manusia yang ada pada Satker BNN Provinsi Sumatera Barat masih sangat kurang. Jumlah keseluruhan personil pada BNN Provinsi Sumatera Barat ASN 10 orang, Polri 10 orang, PPNPN 28 orang. Berdasarkan ketentuan Daftar Susunan Pegawai pada Provinsi sebanyak 211 Orang.

Kebijakan yang dilakukan BNNP Sumatera Barat dalam menangani permasalahan narkoba yaitu penanganan secara seimbang, terintegrasi dan komprehensif antara *demand reduction* dan *supply reduction*. Implementasi dari kebijakan tersebut yaitu melakukan sosialisasi dan penyuluhan P4GN secara masif ke semua lini seperti dilingkungan instansi pemerintah, swasta, pendidikan, pelaku usaha dan seluruh komponen masyarakat. BNNP Sumatera Barat juga berupaya melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ke seluruh lapisan masyarakat dengan mengintegrasikan program P4GN melalui konsep pembangunan berwawasan anti narkoba, menumbuhkan kepedulian dan kemandirian masyarakat dalam program P4GN dari tingkat desa/kelurahan dengan mendorong relawan-relawan anti narkoba menjadi pelaku P4GN secara mandiri, melakukan rehabilitasi bagi para pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba serta menangkap para pelaku kejahatan narkoba yang berada diwilayah Provinsi Sumatera Barat tanpa pandang bulu.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja Kepala BNNP Sumatera Barat kepada Kepala BNN dan para pemangku kepentingan lainnya atas pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diperjanjikan pada awal tahun anggaran 2022.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkoba Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkoba Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah maupun masyarakat;
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI SERTA STRUKTUR ORGANISASI

1. Kedudukan

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi. BNNP berkedudukan di ibukota Provinsi. BNNP berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional dan dipimpin oleh Kepala.

2. Tugas Pokok

BNNP Sumatera Barat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN di wilayah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, BNNP menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya di sebut P4GN dalam wilayah Provinsi;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan dalam wilayah Provinsi;
- c. Pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi;
- d. Pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Provinsi;

- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Provinsi;
- f. Pelayanan administrasi BNNP;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNP.

4. Kewenangan

Kewenangan BNNP secara umum secara implisit terlihat pada tugasnya. Namun, kewenangan yang dikhususkan undang-undang adalah tugas dalam melaksanakan pemberantasan jaringan sindikat Narkoba, BNNP berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan.

5. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, susunan organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat terdiri atas :

- a. Kepala
- b. Bagian Umum
- c. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat
- d. Bidang Rehabilitasi
- e. Bidang Pemberantasan

STRUKTUR ORGANISASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT



6. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat pada Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) disusun dengan sistematika sebagai berikut:



Pendahuluan

Menyajikan tentang latar belakang penyusunan laporan kinerja, kedudukan, tugas, fungsi, dan struktur organisasi BNN



Perencanaan Kinerja

Menyajikan informasi tentang Rencana Program Kerja yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran strategis. Selain itu juga menyajikan Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja BNN Tahun 2022.



Akuntabilitas Kinerja

Menyajikan informasi tentang kinerja sasaran strategis dan capaian Indikator Kinerja BNN Tahun 2022. Selain itu juga menyajikan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja dan realisasi anggaran tahun 2022.



Penutup

Menyajikan simpulan umum capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilaksanakan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya



Lampiran

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain – lainnya yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS / RENCANA PROGRAM KERJA

Kebijakan dan strategi operasional BNN Provinsi Sumatera Barat merupakan rumusan penjabaran dari kebijakan dan strategi BNN. Kebijakan dan strategi BNN tahun 2020-2024 adalah:

1. penguatan pengawasan jalur penyelundupan narkoba;
2. peningkatan kualitas penindakan kejahatan narkoba;
3. pembangunan ketahanan dan pemberdayaan masyarakat;
4. peningkatan kapabilitas rehabilitasi;
5. penguatan sinergi dan kolaborasi stakeholder.

Kebijakan dan strategi BNN yang bersifat makro tersebut dispesifikasi dan disesuaikan dengan kondisi aktual permasalahan narkoba yang terjadi di wilayah provinsi. Selain itu, dalam rumusan Kebijakan dan strategi BNN Provinsi Sumatera Barat juga menyelaraskan dengan kebijakan BNN yang berorientasi pada penguatan pelaksanaan P4GN dan peningkatan kapasitas organisasi BNN.

Dalam hal ini, kebijakan dan strategi yang dirumuskan BNN Provinsi Sumatera Barat sifatnya sangat kontekstual dan sesuai dengan kondisi dan karakteristik kewilayahan. Adapun kebijakan dan strategi operasional BNN Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

1. Meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Daerah
2. Memperkuat kerja sama dengan stakeholder terkait P4GN
3. Mengoptimalkan peran dan fungsi relawan narkoba, penggiat anti narkoba, Agen Pemulihan sebagai perpanjangan tangan BNN Provinsi Sumatera Barat
4. Pembentukan unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) sebagai wadah pelaksanaan rehabilitasi penyalahguna narkoba
5. Meningkatkan Informasi dan Layanan Publik
6. Menambahkan Jumlah Sumber Daya Manusia

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat menetapkan rencana kinerja Tahun 2022 sesuai dengan arah kebijakan dan rencana kinerja BNN Tahun 2022. Rencana kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera

Barat sebagai gambaran pelaksanaan program kerja BNN dalam satu tahun kedepan di wilayah provinsi bersama seluruh jajaran unit kerja BNN Kabupaten/Kota. Adapun rencana target kinerja dan kebutuhan pendanaan BNN Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkotika berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	4 Kab/kota	Rp. 368.344.000
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkotika berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	4 Kab/kota	Rp. 448.505.000
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi	4 Kab/kota	Rp. 899.570.000

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1 Kawasan	Rp. 149.874.000
			Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)	2,6 Indeks	
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	25 Orang	Rp. 181.658.000
			Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	5 Orang	N/A
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi	1 Lembaga	Rp 600.000
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di	6 Unit	Rp. 107.845.000

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
			Wilayah Provinsi		
			Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNP	3,2	
7.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	17 Berkas	Rp. 1.121.982.000
			Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan*)	-	-
8.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100 Indeks	Rp. 272.860.000
			Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100 Indeks	
9.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNP	89 Indeks	Rp. 101.807.000
			Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	4 Kabupaten/ Kota	-

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
10.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP	95	Rp. 4.236.896.000
			Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	4 Kabupaten/kota	-

C. PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) merupakan mata rantai kegiatan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perjanjian Kinerja menjadi dasar bagi penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran setiap unit organisasi dan dasar penetapan bagi sasaran kinerja pegawai.

BNN sebagai instansi vertikal dari BNN memiliki visi, misi dan tujuan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- Visi : “Mewujudkan masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkoba dalam rangka menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong- royong”.
- Misi : 1. Memberantas Peredaran Gelap dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba secara Professional
2. Meningkatkan kemampuan Lembaga rehabilitasi dan pemberdayaan ketahanan masyarakat terhadap kejahatan Narkoba
3. Mengembangkan dan memperkuar kapasitas kelembagaan

Adapun tujuan yang ditetapkan adalah:

1. Melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba;
2. Mewujudkan transformasi layanan publik yang berkualitas.

Upaya mewujudkan visi, misi dan tujuan dalam rangka peningkatan penanganan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba ditetapkan perjanjian kinerja. Melalui perjanjian kinerja ini terwujudlah komitmen dan kesepakatan berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dalam perjanjian kinerja berisikan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target yang akan dicapai melalui program dan kegiatan Lembaga/instansi. Adapun Perjanjian BNNP Sumatera Barat Tahun 2022 sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 1.
Perjanjian Kinerja BNNP Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	4 Kab/kota
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	4 Kab/kota
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi	4 Kab/kota
4.	Penyelenggaraan	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari	1 Kawasan

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA
	Pemberdayaan Alternatif	wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	"Bahaya" menjadi "Waspada"	
			Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)	2,6 Indeks
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	25 Orang
			Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	5 Orang
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi	1 Lembaga
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi	6 Unit
			Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNP	3,2
7.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	17 Berkas
			Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan*)	-
8.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100 Indeks

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA
			Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100 Indeks
9.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNP Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	89 Indeks 4 Kabupaten/ Kota
10.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	95 4 Kabupaten/ kota

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. ANALISIS CAPAIAN SASARAN

Dalam rangka pelaksanaan rencana program dan kegiatan yang telah diuraikan diatas, BNNP Sumatera Barat telah berupaya semaksimal mungkin agar dapat menghasilkan kinerja yang optimal, efisien, efektif transparan dan akuntabel.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Perjanjian kinerja BNNP Sumatera Barat tahun 2021 menetapkan 13 (tiga belas) sasaran kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan sebanyak 18 (delapan belas) indikator. Disamping itu BNNP Sumatera Barat juga melakukan berbagai kegiatan pendukung lainnya dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja di wilayah Sumatera Barat.

Tabel 2.
Realisasi Capaian Kinerja BNNP Sumatera Barat Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	4 Kabupaten/ Kota	4 Kabupaten/ Kota	100
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	4 Kabupaten/ Kota	4 Kabupaten/ Kota	100
3	Meningkatnya kesadaran dan	Jumlah kabupaten/kota	4	3	75

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
	kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	Kabupaten/ Kota	Kabupaten/ Kota	
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1 Kawasan	1 Kawasan	100
		Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	2,6	2,85	109
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	25 Orang	31 Orang	124
		Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	5 Orang	N/A	N/A
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi	-		
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi	6 Unit	6 Unit	100
7	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Sumatera Barat	3,2	3,327	103,9

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
9	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	17 Berkas	32 Berkas	188,23
		Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan	-	-	-
10	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100 Indeks	100	100
		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba	100 Indeks	100	100
12	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Sumatera Barat	89	82,21	92
		Jumlah BNN Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	4 Kabupaten/ Kota	1 Kabupaten / Kota	25
13	Meningkatnya tata Kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Sumatera Barat	95	97,06	102
		Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	4 Kabupaten/ kota	4 Kabupaten/ Kota	100

Pengukuran tingkat capaian kinerja pada BNNP Sumatera Barat dilakukan dengan pemantauan dan evaluasi secara langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat. Tingkat capaian kinerja BNNP Sumatera Barat selama tahun 2022 berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilihat dalam bentuk tabel dan narasi.

1.	Sasaran : Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
-----------	---

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	100

Definisi operasional dari Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi adalah Jumlah kabupaten/kota yang/remajanya memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri menghindari dari dan menolak segala bentuk penyalahgunaan Narkoba yang mencapai nilai 52

Tabel 3.
Rekapitulasi Perhitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (DEKTARI) Tahun 2022

No.	Unit Vertikal	Nilai Dektari	Kategori
1	BNNP Sumatera Barat	50,35	Tinggi
2	BNN Kota Payakumbuh	50,98	Tinggi
3	BNN Kota Sawahlunto	53,24	Tinggi
4	BNN Kabupaten Solok	57,21	Sangat Tinggi
5	BNN Kabupaten Pasaman Barat	52,45	Tinggi
DEKTARI PROV. SUMATERA BARAT		52,85	Tinggi

Dari tabel diatas diketahui bahwa penghitungan Dektari menggunakan aplikasi *mobile* Dektari Aja terhadap remaja usia 12 – 21 tahun (pelajar atau mahasiswa) yang telah dilakukan penyuluhan/ sosialisasi oleh penyuluh narkoba di BNNP dan BNNK. Hasil angka penghitungan Dektari Tahun 2021 adalah 52, 30 (Kategori Tinggi) dengan target angka 52 (Kategori Tinggi), Adapun klasifikasi hasil capaian sebagai berikut:

- 1) Kategori Sangat Tinggi ($\geq 53, 71$)
- 2) Kategori Tinggi (49,74 – 53, 50)
- 3) Kategori Rendah (45, 98 – 49,73)
- 4) Kategori Sangat Rendah ($\leq 45, 97$)

Berdasarkan kegiatan pengelolaan informasi dan edukasi BNNP Sumatera Barat diperoleh Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahguna Narkoba **52, 85 (Kategori Tinggi)**. Artinya, Kemampuan Remaja Sumatera Barat untuk mengendalikan diri, menghindari dari dan menolak segala bentuk penyalahgunaan Narkoba tinggi.

Dari penghitungan di atas, dapat dilihat BNNP Sumatera Barat bahwa Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi tercapai 4 kabupaten/kota Hal ini dapat disimpulkan bahwa target capaian BNNP Sumatera Barat pada indikator tersebut adalah 100%.

Adapun yang menjadi faktor keberhasilan diantaranya:

1. Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi
2. Tingginya antusiasme dari remaja yang mengikuti kegiatan penyuluhan / sosialisasi mengenai bahaya Narkoba
3. Partisipasi para siswa yang tergabung dalam Duta Sinar untuk menjadi agen BNN di lingkungan sekolahnya.
4. Responden dapat mengisi kuisisioner sesuai petunjuk yang diberikan saat kegiatan sosialisasi/ penyuluhan.

Sedangkan kendala yang dihadapi adalah Target pengisian kuisisioner 100 orang, sementara kegiatan pelatihan soft skill hanya untuk 20 orang. sehingga tidak sesuai antara ketersediaan anggaran dengan target yang diminta.

Langkah-langkah tindak lanjut yang dilakukan dalam upaya meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba adalah kerjasama dengan media tidak saja dalam hal penempatan konten, tetapi juga dalam pembuatan konten-konten yang kreatif yang dapat menarik selain itu adanya bimbingan lebih lanjut dalam pengisian kuisisioner terhadap remaja. Kemudian untuk memenuhi target pengisian Dekteri 100 orang pada Tahun 2022 diperoleh dari kegiatan penyuluhan Non DIPA.

Sebagai rekomendasi kedepan kegiatan pelatihan soft skill dapat mengakomodir minimal 100 orang peserta untuk pengisian kuisisioner Dekteri.

Inovasi yang telah dilakukan selama tahun 2022 dalam upaya meningkatkan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba diantaranya :

1. Kerjasama dengan media tidak saja dalam hal penempatan konten, tetapi juga dalam pembuatan konten-konten yang kreatif, sarat makna dan disesuaikan dengan kearifan lokal;
2. Melakukan pelayanan publik keliling ;
3. Pelaksanaan lomba kreatif tingkat sekolah menengah;
4. Pencapaian target 100 orang remaja yang mengisi kuisisioner Dekteri diantisipasi melalui kegiatan penyuluhan NON DIPA.

2.	Sasaran : Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
-----------	--

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	4 kabupaten/ kota	4 kabupaten/ kota	100

Definisi operasional dari Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi adalah Jumlah kabupaten/kota yang keluarganya memiliki kemampuan untuk untuk terhindar dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dengan Indeks Ketahanan Keluarga 78,68.

Kegiatan yang dilakukan dalam mencapai kegiatan tersebut dengan melakukan intervensi ketahanan keluarga anti narkoba terhadap 10 orang keluarga (20 orang) pada setiap wilayah BNNP dan BNNKab/Kota serta melakukan pengisian kuisisioner Dektara.

Tabel 4.
Rekapitulasi Perhitungan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap
Penyalahgunaan Narkoba (DEKTARA)
di Lingkungan BNNP Sumatera Barat TA. 2022

NO.	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	BNNP Sumatera Barat	88,036	Tinggi
2	BNN Kota Payakumbuh	79,375	Tinggi
3	BNN Kota Sawahlunto	81,696	Tinggi
4	BNN Kabupaten Solok	85,536	Tinggi
5	BNN Kabupaten Pasaman Barat	79,554	Tinggi

Dari table diatas diketahui bahwa perhitungan Indeks Ketahanan Keluarga menggunakan aplikasi Dektara yaitu setiap BNNKab/Kota dan BNNP memilih Desa/Kelurahan yang telah ditentukan, kemudian diampel sampel dari keluarga yang telah di intervensi (keluarga yang terdiri dari anak dan orangtua). Hasil angka perhitungan Dektara Tahun 2022 adalah 84,274 (Kategori Tinggi) dengan target angka 78, 68 (Kategori Tinggi). Adapun klasifikasi capaian wilayah sebagai berikut:

- 1). Kategori sangat tinggi (88,31 – 100,0)
- 2). Kategori tinggi (76, 61 – 88,30)
- 3). Kategori rendah (65, 00 – 76, 60)

Dalam pelaksanaan kegiatan hambatan/kendala yang dihadapi adalah: indikator yang bisa dijadikan acuan dalam pencapaian target kinerja ini tidak dijelaskan secara terperinci pada awal penginputan sehingga hasil pengisian tidak transparan serta hasil kuesioner dalam aplikasi The Statistic tidak bisa dilihat secara langsung (real time). Hal ini mengakibatkan keluarga pada lokus kegiatan kami kesulitan untuk mengetahui indikator mana saja yang terlewatkan dalam pengisian, dan indikator apa saja yang menjadi dasar dalam penilaian sehingga responden mengetahui kekurangan dari pengisian kuesioner yang telah diisi.

Adapun faktor keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan diantaranya:

1. Dukungan stakeholder kelurahan dalam melaksanakan kegiatan intervensi ketahanan keluarga.
2. Kerjasama dengan pihak ketiga dalam fasilitasi kegiatan intervensi ketahanan keluarga.
3. Tingginya antusias Keluarga untuk menciptakan lingkungan bebas narkoba di Lingkungannya

Sedangkan faktor kegagalan dari pelaksanaan kegiatan ini diantaranya:

1. Indikator yang bisa dijadikan acuan dalam pencapaian target kinerja tidak dijelaskan secara terperinci pada awal penginputan sehingga hasil pengisian tidak transparan dan tidak real time.
2. Kurangnya kepedulian keluarga di kab/kota.
3. Dimensi proses komunikasi yang belum dipahami/berjalan secara baik oleh peserta kegiatan

Upaya yang dilakukan dalam mencapai indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahguna narkoba (DEKTARA) adalah :

1. Menciptakan fasilitas dan media pendukung kegiatan intervensi ketahanan keluarga yang baik.
2. berkoordinasi dengan Lurah, Camat dan Nagari setempat.
3. Melakukan pemantauan berkala terhadap kebijakan pemerintah dalam mendukung program ketahanan keluarga.

Inovasi yang telah dilakukan selama tahun 2022 dalam upaya meningkatkan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba diantaranya:

1. Melakukan Informasi Edukasi keliling melalui mobil sosialisasi;
2. Kegiatan dilaksanakan di Kawasan wisata;
3. Materi dalam kegiatan tersebut tersedia dalam bentuk hardcopy yang dibagikan kepada peserta saat pertemuan terakhir dan bisa diakses oleh peserta melalui link/bit.ly yang disediakan.

3.	Sasaran : Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN
-----------	---

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah kabupaten / kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “ Mandiri “ di wilayah Provinsi	4 Kabupaten /kota	3 Kabupaten /kota	75

Program pemberdayaan anti narkoba pada 2022 melalui indikator kinerja ‘Indeks Kemandirian Partisipasi’ (IKP) sedangkan untuk BNNKab/Kota berfokus pada pembentukan Kota Tanggap Ancaman Narkoba (KOTAN) merupakan kegiatan yang bertujuan untuk membangun kemitraan dan sinergitas dengan target menjadikan lembaga/institusi/lingkungan masyarakat aktif, mandiri, sukarela dan berkelanjutan mensosialisasikan progam P4GN serta terbentuknya penggiat anti narkoba.

Kegiatan dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN berupa rapat kerja, pengembangan kapasitas dan pembinaan masyarakat berupa workshop dan bimbingan teknis anti narkoba. Dalam mencapai target dilakukan dengan pengisian kuisisioner IKP dari perhitungan nilai IKP terhadap lingkungan pemerintah, dunia usaha, masyarakat dan pendidikan di Kab / Kota yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan P4GN yang berupa adanya rapat kerja, pengembangan kapasitas dan pembinaan masyarakat, workshop . bimbingan teknis anti narkoba. Perhitungan dilakukan dengan rumus :

$$IKP = \frac{\text{Hasil penghitungan kuisisioner}}{\dots}$$

Tabel 5.
Rekapitulasi Indeks Kemandirian Partisipasi
di Lingkungan BNNP Sumatera Barat TA. 2022

NO	LINGKUNGAN	SATKER				
		BNNP SUMBAR	BNNK PAYAKUMBUH	BNNK SAWALUNTO	BNNK SOLOK	BNNK PASAMAN BARAT
1	PEMERINTAH	3,86 Mandiri	3,2 Mandiri	3,20 Mandiri	3,76 Sangat Mandiri	3,16 Mandiri
2	DUNIA USAHA	3,00 Mandiri	3,2 Mandiri	4 Sangat Mandiri	3,43 Sangat Mandiri	3,20 Mandiri
3	MASYARAKAT	3,32 Sangat Mandiri	3,2 Mandiri	4 Sangat Mandiri	3,86 Sangat Mandiri	2,36 Kurang Mandiri
4	PENDIDIKAN	2,92 Mandiri	3,2 Mandiri	3,04 Mandiri	2,81 Mandiri	3,08 Mandiri
TOTAL		12,92	12,80	14,24	13,86	11,8
RATA – RATA		3,23 Mandiri	3,2 Mandiri	3,56 Mandiri	3,47 Sangat Mandiri	2,95 Mandiri

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” tercapai oleh 4 kabupaten /kota.

Faktor keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah: terbentuknya penggiat anti narkoba yang berkerja secara suka rela.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam meningkatkan institusi/lembaga yang turut berpartisipasi dalam program pemberdayaan anti narkoba, diantaranya:

1. Memaksimalkan peran serta para penggiat anti narkoba guna mendukung program P4GN;
2. Meningkatkan pengetahuan penggiat anti narkoba secara berkala dan berkesinambungan;
3. Memantau dan melakukan pendekatan agar stakeholder terkait melaksanakan program P4GN di lingkungan masing – masing.

4.	Sasaran : Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan
----	---

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui 2 (dua) indikator kinerja sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah Kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari “bahaya” menjadi “waspada”	1 kawasan	1 kawasan	100
2.	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi	2,6 Indeks	2,85 Indeks	109

Kawasan/wilayah rawan narkoba yang diintervensi program pemberdayaan alternatif merupakan kawasan / wilayah yang memiliki kategori “**bahaya**”. Upaya untuk memulihkan kawasan/ wilayah rawan Narkoba dapat memaksimalkan potensi pada kawasan tersebut dengan arah yang positif melalui rapat kerja, audiensi, bimbingan teknis stakeholder dan pendampingan dalam rencana aksi, pelatihan lifeskill, dan pembinaan masyarakat anti narkoba.

Dalam melakukan pemberdayaan alternatif pada kawasan/wilayah rawan terlebih dahulu dilakukan pemetaan , agar kegiatan pembinaan yang akan diberikan tepat sasaran khususnya di Kenagarian Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat. Selanjutnya dilakukan pengisian kuisisioner IKKR , kuisisioner SKM, dan kuisisioner program dan kegiatan kewirausahaan.

Tabel 6.
Kawasan/Wilayah Rawan Narkoba yang diintervensi
Program Pemberdayaan Alternatif TA. 2022

No	Nama Kawasan/Wilayah	Jumlah yang dibina	Jenis Life Skill	Stakeholder yang terlibat	Bentuk Keterlibatan
1	Masyarakat Kawasan Kanagarian Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat	15 orang	Budidaya Pembesaran Ikan Lele	Kementerian Kelautan Perikanan	Instruktur / Pelatih

Pemberdayaan yang dilakukan berupa pelatihan *life skill* Budidaya Pembesaran Ikan Lele. Kegiatan diikuti oleh 15 (lima belas) orang peserta yang terdiri dari mantan pecandu di Kenagarian Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat.

Pelatihan *life skill* ini terwujud karena adanya dukungan dari stakeholder yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan masyarakat yang bersih dari narkoba, mandiri dan produktif.

Faktor keberhasilan pelaksanaan kegiatan diantaranya:

1. Terciptanya Kawasan bebas narkoba yang bersinergi dengan pencanangan Desa Bersinar dan pelaksanaan kegiatan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM).

Dalam pencapaian indikator kinerja juga terdapat kendala yaitu kurangnya motivasi dan kepedulian stakeholder di kawasan atau wilayah bahaya.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan dalam meningkatkan jumlah kawasan/wilayah rawan yang diintervensi program pemberdayaan alternatif diantaranya:

1. Perlunya dukungan pemerintah setempat
2. Perlu dilakukan pembinaan dan pengembangan pelatihan *life skill* yang telah diberikan secara berkesinambungan.

Sedangkan untuk nilai keterpulihan Kawasan rawan yang diintervensi 1 kawasan berkategori 2,85 (siaga) dihitung dengan cara :

$$\text{Nilai IKKR} = \frac{\text{Total Jumlah Responden}}{\text{Jumlah Bobot}}$$

Dengan rincian sebagai berikut :

Kelurahan Rawang berkategori **BAHAYA** beralih status keterpuliannya menjadi **SIAGA** dengan **IKKR 2, 85**

5. Sasaran : Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui 2 (dua) indikator kinerja sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	25 orang	31 orang	124

Definisi operasional dari jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih merupakan pelaksanaan pelatihan yang diberikan kepada agen pemulihan sebagai petugas layanan Intervensi Berbasis Masyarakat. Agen Pemulihan sebagaimana dimaksud adalah perorangan yang dilatih dan diberikan pembekalan teknis oleh BNN agar mampu menyelenggarakan layanan rehabilitasi kategori resiko rendah sesuai dengan Juknis IBM di masing-masing lokasi.

Pada indikator kinerja jumlah petugas penyelenggaraan IBM merupakan jumlah petugas Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang mendapatkan pelatihan dan bimbingan teknis oleh BNNP dan BNNKab/Kota dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7.
Petugas Penyelenggara layanan IBM yang terlatih BNNP dan BNNKab/Kota
TA. 2022

No	Satker	Nama Agen Pemulihan	Lokasi
1	BNNP Sumatera Barat	Ir. Yulia Suryani	Kelurahan Pegambiran dan Nagari Sungai Buluh Selatan, Kab. Padang Pariaman
		Yanuarman	
		Meyriko Rhjab	
		Henryanto Abaharis	
		Agusnaldi	
		Puri Julia	
		Defri Putra	
		Panji Brt	
		Ipirmansyah	
		Sedondadeli	
		Roy Marshedo	
2	BNN Kota Payakumbuh	Musri , S.Pd	Kelurahan Koto Tangah

		Nasri, S.Pd	
		Madya Rawa Dewi	
		Linda Silvia	
		Yon Kasman	
3	BNN Kota Sawahlunto	Harlen	Desa Silungkang Tigo
		Gyovanny, S.A.P	
		Ferdinal	
		Zuber	
		Narsi, S.Pd	
4	BNN Kabupaten Solok	Edy Yasman	Nagari Salayo
		Medi Setiawan	
		Yoce Yolanda	
		Martis Wandra	
		Frandi	
5	BNN Kabupaten Pasaman Barat	Maisar	Nagari Lingkung Aua Kecamatan Pasaman Kab. Pasaman Barat
		Juppi	
		Muhammad Anggono	
		Zureka Erina	
		Afrudin	

Selama tahun 2022 tercatat sebanyak **56 orang klien** yang di fasilitasi oleh Agen Pemulihan untuk mendapatkan layanan rehabilitasi.

Faktor keberhasilan dalam pencapaian indikator jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih yaitu

1. Background (Profesi) dari masing-masing AP dan komitmen dari masyarakat atau pemerintah setempat dalam mendukung aktivitas IBM.

Sedangkan Faktor kegagalan dalam pencapaian indikator jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih adalah :

1. Petugas IBM yang dilatih ada yang kurang aktif
2. Agen Pemulihan sebagai Petugas Penyelenggara Layanan IBM yang wajib berasal dari Desa/ Kelurahan yang sama, menjadi kendala bagi Kota Kecil seperti khususnya di Sawahlunto.
3. Kurangnya pemahaman AP dalam pelaksanaan layanan IBM sehingga perlu dilakukan pendampingan dari petugas BNNP/ BNNKab/Kota.

Adapun yang menjadi kendala pada pelaksanaan kegiatan diantaranya:

1. Menyesuaikan jadwal Agen Pemulihan (AP) dengan layanan yang diberikan kepada klien secara umum yang masih berstatus pelajar/ sekolah
2. Dukungan pemerintah daerah belum maksimal terutama dalam segi anggaran untuk keberlangsungan program IBM di tahun berikutnya.

Langkah-langkah tindak lanjut yang dilakukan dalam mengatasi kendala diantaranya :

1. Tetap memotivasi agen pemulihan agar pelaksanaan kegiatan IBM dapat berjalan sesuai dengan harapan;
2. berkoordinasi dengan aparaturnya Pemerintah setempat dalam mendukung kegiatan IBM.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
2.	Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	5 orang	N/A	N/A

Definisi operasional dari Jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis merupakan jumlah petugas rehabilitasi yang sudah memenuhi standar kompetensi dalam melakukan penerimaan awal, skrining, asesmen, membuat rencana terapi, intervensi, melakukan intervensi dan rujukan pada profesional lainnya.

Pada indikator ini, pelaksanaan kegiatan pada Uji Sertifikasi tidak dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 dikarenakan adanya Automatic Adjustment (Blokir Anggaran).

6.	Sasaran : Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika
----	--

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui 2 (dua) indikator kinerja sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi	1 Lembaga	1 Lembaga	100

Definisi operasional dari jumlah Lembaga rehabilitasi yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) di wilayah Provinsi Sumatera Barat adalah Lembaga yang menyelenggarakan layanan rehabilitasi baik milik BNN dan mitra BNN dengan metode rehabilitasi sosial maupun medis yang berdasarkan SNI 8807:2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Bagi Pecandu, Penyalah Guna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA).

Petugas rehabilitasi BNN Provinsi Sumatera Barat akan melakukan pembinaan teknis terhadap penyelenggaraan layanan di Lembaga milik BNN dan mitra BNN agar memenuhi SPM berupa supervisi program, supervisi klinis, dan asistensi.

Sedangkan komponen SPM meliputi sebagai berikut :

- a. Komponen identitas dan data demografi (berupa data umum Lembaga rehabilitasi yang mencakup dasar hukum pendirian Lembaga rehabilitasi, jenis layanan yang diberikan, hingga metode layanan yang digunakan dalam proses rehabilitasi penyalahguna narkoba);
- b. Komponen penilaian umum (berupa kelembagaan, pelayanan , monitoring dan evaluasi, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia (SDM);
- c. Komponen penilaian khusus (berupa jenis layanan, rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial).

Dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan petugas rehabilitasi BNN Provinsi Sumatera Barat , Lembaga yang memenuhi standar pelayanan minimal di wilayah Provinsi Sumatera Barat adalah **Yayasan Karunia Insani**.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
2.	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah Provinsi	6 Unit	6 Unit	100

Definisi operasional dari Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah Provinsi adalah layanan rehabilitasi melalui Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang operasional.

Target BNNP Sumatera Barat dan jajarannya pada indikator Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah Provinsi sebanyak 6 Unit, antara lain :

Tabel 8.
Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM)
di Provinsi Sumatera Barat TA. 2022

No	Satker	Lokasi IBM	Target Klien (Orang)	Realisasi Klien (Orang)
1	BNN Provinsi Sumatera Barat	Kelurahan Pegambiran	20	10
		Nagari Sungai Buluah Selatan, Kec. Batang Anai, Kab. PadangPariaman		-
2	BNN Kota Payakumbuh	Kelurahan Koto Tengah	8	10
3	BNN Kota Sawahlunto	Desa Silungkang Tigo	20	1
4	BNN Kabupaten Solok	Nagari Salayo	20	20
5	BNN Kabupaten Pasaman Barat	Nagari Lingkung Aua Kecamatan Pasaman Kab. Pasaman Barat	15	15
TOTAL			83	56

Dalam upaya pelaksanaan layanan intervensi masyarakat BNNP Sumatera Barat dan jajarannya memiliki target 6 unit / lokasi dan jumlah klien sebanyak 56 (lima puluh enam) klien. Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) adalah intervensi di bidng rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba yagn dirancang dari masyarakat, untuk masyarakat, dan oleh masyarakat melalui Agen Pemulihan dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat sesuai dengan kearifan lokal. IBM melakukan pendekatan rehabilitasi dalam bentuk sederhana dengan ambang batas rendah (low threshold), yang berarti layanan tersebut mudah diakses dan tidak membutuhkan persyarakat untuk terlibat didalamnya.

Adapun faktor keberhasilan dalam pencapaian indikator jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah Provinsi Sumatera Barat adanya dukungan dari Lurah/ Wali Nagari/

Camat serta komponen masyarakat dalam pembentukan lokasi unit dalam pelaksanaan program IBM.

Sedangkan Faktor kegagalan dalam pencapaian indikator jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah Provinsi Sumatera Barat dengan tidak tercapainya jumlah klien karena domisili klien yang berpindah saat pelaksanaan program serta ketakutan akan stigma bagi pecandu/penyalahguna narkotika.

Hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan diantaranya :

1. Sinkronisasi jadwal kegiatan antara agen pemulihan (AP) dengan klien dan petugas BNNP dan BNNKab/Kota;
2. Jarak lokasi penyelenggaraan kegiatan IBM yang cukup jauh;
3. Adanya wabah covid-19 sehingga unit setempat mengambil kebijakan untuk membatasi aktifitas kegiatan tatap muka.

Langkah - langkah antisipatif yang akan dilakukan adalah : Memotivasi agen pemulihan untuk tetap mendampingi klien, serta berkoordinasi dengan aparat pemerintah setempat dalam mendukung kegiatan IBM.

7.	Sasaran : Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi
-----------	--

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Sumatera Barat	3,2	3,327	103

Pelaksanaan kajian penerima layanan rehabilitasi ini dilaksanakan pada tanggal Januari - November 2022 dengan menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari layanan rehabilitasi di Klinik Pratama BNN Provinsi Sumatera Barat. Proses pengumpulan data dilaksanakan serentak di seluruh klinik pratama BNNP dan BNNK se Indonesia, dan di akomodir oleh Direktorat Pascarehab BNN bersama konsultan penelitian. Setelah data terkumpul, pihak Dir. Pasca dan Konsultan melaksanakan *cleaning* data sebelum dilanjutkan ke tahap analisis data.

Tabel 9.
Hasil Survey Kajian Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi
di BNNP Sumatera Barat dan jajarannya TA. 2022

No	Satker	IKM	Ketegori
1	BNNP Sumbar	3,013	Baik
2	BNN Kota Payakumbuh	3,553	Baik
3	BNN Kota Sawahlunto	3,475	Baik
4	BNN Kabupaten Solok	3,213	Baik
5	BNN Kabupaten Pasaman Barat	3,335	Baik
	TOTAL	3,327	Baik

Secara keseluruhan nilai dari Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk layanan rehabilitasi di Klinik Pratama BNN Provinsi Sumatera Barat bernilai **Baik** dengan scoring 3,327 (untuk skala 100).

Evaluasi indikator kinerja dilihat dari penilaian berdasarkan pengisian survei kepuasan layanan terhadap klien Klinik Pratama BNNP Sumatera Barat

Faktor keberhasilan dalam pencapaian target Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Provinsi Sumatera Barat adalah : pelaksanaan rehabilitasi tidak dipungut biaya , pelaksanaan layanan rehabilitasi dilaksanakan sesuai prosedur.

Kendala/hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan diantaranya :

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia;
2. Tingginya angka DO dari klien karena komitmen klien kurang.

Langkah-langkah tindak lanjut yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah: Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan SDM yang ada seperti konselor dan berkoordinasi dengan pihak terkait.

9.	Sasaran : Meningkatnya Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika dan Lahan Tanaman Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya
-----------	--

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21	17	32	188,23

Jumlah kasus tindak pidana peredaran gelap narkoba yang P.21 adalah jumlah penyidikan terhadap tindak pidana narkotika dengan metode pengukuran berkas perkara tindak pidana narkotika yang telah selesai penyidikan dan lengkap setelah dikonsultasikan dengan kejaksaan dan dinyatakan dengan surat penetapan P.21.

Target yang ditetapkan pada indikator kinerja jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P.21 adalah 17 berkas perkara dan realisasi 32 berkas perkara, sehingga capaian kinerjanya adalah 188,23 %. Dan masih terdapat 16 berkas perkara yang dalam proses P.21 pada BNNP Sumbar dan BNNKab/Kota.

Adapun faktor keberhasilan capaian tersebut diantaranya: kerjasama dengan personil yang berkomitmen memberantas peredaran gelap narkoba.

Langkah-langkah tindak lanjut yang dilakukan diantaranya:

1. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM melalui pelatihan penyidik, pelatihan analisis wiretapping
2. Terdapat berkas perkara yang masih dalam proses P21 sebanyak : 16 Berkas BNNP Sumbar dan BNNKab/Kota yang akan diselesaikan di Tahun 2023

10.	Sasaran : Meningkatkan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti Narkotika
-----	---

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui 2 (dua) indikator kinerja sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan	100 Indeks	100 Indeks	100
2.	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100 Indeks	100 Indeks	100

Tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan adalah Kondisi tidak terjadinya segala gangguan yang dapat mempengaruhi keamanan, ketertiban kesehatan tahanan yang dapat mengganggu proses penyidikan seperti halnya tidak ada tahanan kabur, cedera serius bahkan yang menyebabkan kematian.

Tabel 10.
Jumlah Tahanan Masuk dan Tahanan Keluar pada Proses Penyidikan TA 2022.

BNNP/BNNK	Laporan Kasus	Tahanan Masuk	Tahanan Keluar	Keterangan Kesehatan	
BNNP Sumbar	LKN 01	1 Tersangka	1 Tersangka	Sehat	
	LKN 02	1 Tersangka	1 Tersangka	Sehat	
	LKN 21	2 Tersangka	-	Proses penyidikan	
	LKN 22	2 Tersangka	-	Proses penyidikan	
	LKN 23	3 Tersangka	-	Proses penyidikan	
	LKN 24	1 Tersangka	-	Proses penyidikan	
BNNK Payakumbuh	LKN 01	2 Tersangka	2 Tersangka	Sehat	
	LKN 05	3 Tersangka	3 Tersangka	Sehat	
	LKN 07	2 Tersangka	2 Tersangka	Sehat	
	LKN 12	1 Tersangka	1 Tersangka	Sehat	
	LKN 16	2 Tersangka	2 Tersangka	Sehat	
	LKN 18	1 Tersangka	1 Tersangka	Sehat	
	LKN 19	1 Tersangka	1 Tersangka	Sehat	
	LKN 20	1 Tersangka	1 Tersangka	Sehat	
	LKN 27	2 Tersangka	1 Tersangka	Sehat	
				0	Proses penyidikan
	LKN 28	1 Tersangka		0	Proses penyidikan

BNNK Sawahlunto	LKN 11	2 Tersangka	2 Tersangka	Sehat
	LKN 8	1 Tersangka	1 Tersangka	Sehat
	LKN13	2 Tersangka	2 Tersangka	Sehat
	LKN 14	3 Tersangka	3 Tersangka	Sehat
BNNK Solok	LKN 01	1 Tersangka	1 Tersangka	Sehat
	LKN 02	1 Tersangka	1 Tersangka	Sehat
BNNK Pasaman Barat	LKN 04	1 Tersangka	1 Tersangka	Sehat
	LKN 06	2 Tersangka	2 Tersangka	Sehat
	LKN 08	1 Tersangka	1 Tersangka	Sehat
	LKN 15	1 Tersangka	1 Tersangka	Sehat
	LKN 17	2 Tersangka	1 Tersangka	Sehat
			0	Proses Penyidikan
	LKN 25	1 Tersangka	0	Proses Penyidikan
	LKN 26	1 Tersangka	0	Proses Penyidikan
LKN 29	2 Tersangka	0	Proses Penyidikan	
JUMLAH		46 Tersangka	32 Tersangka	

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah tahanan yang masuk berbeda dengan jumlah tahanan yang keluar, dikarenakan beberapa kasus masih dalam proses sidik dan proses tahap I yang masih berlanjut pada tahun 2023. Namun dalam hal ini, tahanan dalam keadaan sehat tanpa ada cedera yang serius, sehingga capaian untuk nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan adalah 100%.

Tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika adalah kondisi keutuhan dan/atau kondisi penyusutan secara wajar pada barang bukti narkotika dan narkotika. Pengukurannya dilakukan dengan membandingkan data kondisi barang bukti narkotika dan non narkotika pada saat diterima dari penyidik dengan waktu dikeluarkannya untuk proses pemusnahan atau diserahkan terimakan untuk tahap penuntutan (tahap II).

Tabel 11.
Jumlah Barang Bukti Narkotika pada Proses Penyidikan 2022

No	Satker	Barang Bukti Narkotika	Barang Bukti Masuk	Barang Bukti yang dimusnahkan & Penyisihan untuk Kepentingan Penyidikan		
				Labor	Pembuktian	Pemusnahan
1	BNNP Sumatera Barat	Shabu	194,78	0,02		194,76
		Ganja	600.026,96	1,5	822,51	37.809,01
		Extacy				
2	BNNK Payakumbuh	Shabu	11,73 gr	0,3 gr	11,43 gr	-
		Ganja	50,13 gr	2,1 gr	48,03 gr	-
3	BNNK Sawahlunto	Shabu	8,00 gr	0,07 gr	7,93 gr	-
		Ganja	-	-	-	
4	BNNK Solok	Shabu	34,75 gr	0,02 gr	34,73 gr	34,75 gr
		Ganja	325, 4 gr	0,4 gr	325 gr	325 gr
5	BNNK Pasaman Barat	Shabu	100,63 gr	0,04 gr	100,59 gr	-
		Ganja	12.881,01 gr	1,5 gr	12.879,51 gr	-
		Sintetis	1,13 gr	0,5 gr	0,63 gr	-
Jumlah			613.634,52 gr	14.235,31 gr		

Tabel 12.
Jumlah Barang Bukti Non Narkotika pada Proses Penyidikan 2022

No	Barang Bukti Non Narkotika	Keterangan
BNNP Sumbar		
1	4 (empat) paket besar diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman di duga jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas coklat dan lakban warna putih	SITA
2	1 (satu) unit Handphone android merek OPPO warna hitam	SITA
3	1 (satu) buah jacket warna hitam merek DONNAY	SITA
4	1 (satu) buah timbangan digital warna silver	SITA
5	1 (satu) buah sendok dari pipet	SITA
6	9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah)	SITA
7	1 (satu) buah dompet warna hitam	SITA
8	1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor kartu 6019007533039070	SITA

9	1 (satu) unit Handphone android merk OPPO Y15 warna biru	SITA
10	1 (satu) unit Handpone android merk OPPO Y15 warna biru.	SITA
11	40 (empat Puluh) paket besar diduga narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibalut dengan lakban warna cokelat	SITA
12	2 (dua) buah karung warna putih	SITA
13	1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna abu-abu metalik BA 1036 VK	SITA
14	1 (satu) unit Handphone android merk Vivo warna Gold dengan soft case warna hitam	SITA
15	1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam	SITA
16	1 (satu) unit GOS merk TK STAR warnaa hitam	SITA
17	1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI	SITA
18	135 (seratus tiga puluh lima) paket besar narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning	SITA
19	7 (tujuh) buah karung yang digunakan untuk membungkus narkotika jenis tanaman ganja kering	SITA
20	4 (empat) lembar uang RP. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) berjumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)	SITA
21	1 (satu) uni Handphone android merk Xiaomi warna hitam	SITA
22	1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam	SITA
23	1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru hitam	SITA
24	1 (satu) Buah dompet warna Cokelat hitam merk louis vuitto	SITA
25	1 (satu) unit mobil merk toyota avanza warna hitam dengan No. Pol B 1417 UIV beserta kunci mobil dan STNK An. PT. BENGKALIS KUDA LAUT	SITA
26	1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah	SITA
27	1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru	SITA

28	1 (satu) Paket kecil dibungkus dalam plastic bening Narkotika jenis Ganja Seberat 0,3152 (nol koma tiga satu lima dua) gram	Sisa dari pemeriksaan barang bukti lab Badan POM RI
BNNK Payakumbuh		
29	Uang Tunai sejumlah Rp 2.400.000,-	SITA
30	12 (dua belas) unit Handphone	SITA
31	5 (lima) unit Sepeda Motor	SITA
32	2 (dua) buah alat penghisap (Bong)	SITA
33	1 (satu) unit Timbangan	SITA
34	6 (enam) pack plastik bening	SITA
35	1 (satu) buah sendok plastik bening	SITA
36	3 (tiga) helai celana	SITA
37	1 (satu) pcs Tas	SITA
BNNK Sawahlunto		
38	1 (satu) Buah Jarum Suntik	SITA
39	1 (satu) Buah Pipet Melekat pada tutup botol	SITA
40	2 (dua) Buah Kaca Pirek	SITA
41	4 (empat) Buah Korek Api Gas	SITA
42	1 (satu) Buah Kantong Kresek warna hijau	SITA
43	1 (satu) Buah Alat hisap (Bong)	SITA
44	6 (enam) Buah Pipet Plasting	SITA
43	1 (satu) Buah Plastik Klip Bening	SITA
45	Uang Tunai Sejumlah Rp. 1.597.000,-	SITA
47	1 (SATU) UNIT SEPEDA MOTOR MERK HONDA BEAT WARNA HITAM TANPA PLAT NOMOR DENGAN NOMOR RANGKA MH1JFP123GK789880 DAN NOMOR MESIN JFP1E2779459	SITA
48	1 (SATU) UNIT HP MEREK OPPO WARNA HITAM dengan nomor imei : 869318043469614 dan 869318043489808	SITA
49	1 (satu) buah dompet warna abu-abu	SITA
50	1 (satu) Buah Alat hisap (Bong)	SITA
51	1 (satu) unit HP merek XIAOMI warna biru	SITA
52	1 (satu) gulungan timah bungkus rokok	SITA
53	2 (dua) buah korek api gas warna hijau	SITA
54	Uang Tunai Sejumlah Rp. 1.250.000,-	SITA
55	2 (dua) buah pipet plastik	SITA
54	1 (satu) buah kaca pirek	SITA

57	1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih	SITA
58	4 (empat) buah plastik Klip Bening	SITA
59	1 (satu) buah korek api gas warna hitam	SITA
60	1 (satu) unit hp OPPO warna Putih	SITA
61	1 (satu) buah dompet warna coklat	SITA
62	1 (satu) helai celana pendek warna hitam merek NIKE	SITA
63	1 (satu) Buah Alat hisap (Bong)	SITA
64	1 (satu) buah tutup botol dengan pipet melekat	SITA
65	1 (satu) buah dompet warna coklat	SITA
66	Uang Tunai Sejumlah Rp. 300.000,-	SITA
67	1 (satu) unit HP merek Oppo warna merah	SITA
68	2 (dua) pak plastik klip bening	SITA
69	1 (satu) buah korek api gas label marlboro	SITA
70	1 (satu) unit timbangan digital	SITA
71	3 (tiga) buah baterai timbangan digital	SITA
72	1 (satu) buah tutup pelek ban mobil	SITA
BNNK Solok		
73	3 (tiga) unit Handphone	SITA
74	1 (satu) unit kendaraan Roda 2	SITA
75	1 (satu) unit kendaraan Roda 4	SITA
76	1 (satu) buah selotip coklat merk goldie tape	SITA
77	1 (satu) buah tas selimut merk Fata warna bening hijau	SITA
78	1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu (bong)	SITA
79	1 (satu) pcs kotak kaca merk channel warna coklat	SITA
80	1 (satu) unit kotak USB charge warna hijau	SITA
81	1 (satu) buah kantong plastic merk Habibi muslim baby & kids warna putih	SITA
BNNK Pasaman Barat		
82	1 (satu) unit Handphone merek Oppo A5 warna Hitam Metalik dengan nomor imei : 869651040465932 dan 86965104046592.	SITA
83	1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Beat warna Putih-Biru tanpa Nomor Polisi dengan nomor rangka MHIJF2134KK599843 dan nomor mesin JF21E3599763	SITA

84	Uang Tunai Sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)	SITA
85	1 (satu) helai Kaos lengan panjang warna putih merek Rocket Cross 1969e. 1 (satu) helai Kaos lengan panjang warna putih merek Rocket Cross 1969	SITA
86	1 (satu) helai celana jeans warna Abu – abu merek Hugo Bill Classic	SITA
87	1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua merek Honda Beat warna Hitam tanpa Plat Nomor Polisi dengan No Rangka MH1JFZ130KK399445 dan Nomor Mesin : JFZ1E3399435.	SITA
88	1 (satu) unit Handphone merek Oppo A3s berwarna Biru dengan nomor imei :866531040269455; 866531040269448.	SITA
89	1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J7 Core berwarna Silver dengan nomor Imei : 352172091093865; 352173091093863.	SITA
90	1 (satu) sweeter warna abu-abu merek Green Light.	SITA
91	1 (satu) Sweeter warna Merah merek 9000sing.	SITA
92	1 (satu) celana training merek Adidas warna abu-abu.	SITA
93	1 (satu) kaos hitam merek Anti Social Sockil Club.	SITA
94	1 (satu) Celana Levis warna hitam merek Levis.	SITA
95	1 (satu) buah tas warna hitam merek AKZ Hand Bag.	SITA
96	1 (satu) buah tas warna hijau merek AKZ Hand Bag.	SITA
97	1 (satu) buah knalpot sepeda motor merek FMF warna silver	SITA
98	1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya berisi Timbangan digital warna silver tanpa merek	SITA
99	1 (satu) unit Handphone merek Relmi 5i warna biru dengan nomor imei : 866999045409675 dan 866999045409667	SITA
100	Uang Tunai sejumlah Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).	SITA
101	1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna bening.	SITA
102	1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya masih terdapat sisa Shabu.	SITA
103	1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik merek Lucky Day.	SITA
104	1 (Satu) unit handphone merek Samsung GT-C3520 warna hitam dengan nomor imei : 356828/05/265339/5 yang didalamnya terpasang 1 (satu) buah kartu Sim Telkomsel POP dengan nomor : 082174114634.	SITA
105	Uang tunai sejumlah Rp. 860.000,- (Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).	SITA
106	1 (Satu) unit kendaraan roda dua jenis Yamaha Mio G warna Putih-Merah Nopol BA 4841 SD dengan nomor mesin 54P-731144 dan nomor rangka MH354P00DDJ730984.	SITA

107	1 (Satu) set alat hisap sabu berupa bong yang terbuat dari botol minuman plastik warna biru.	SITA
108	1 (Satu) buah kaca pirek.	SITA
109	1 (Satu) helai Celana Pendek warna coklat merek BE FOREVER UGIZ.	SITA
110	Uang Tunai sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).	SITA
111	Bukti transfer Bank BRI Nomor Rekening 0367-01-080186-50-5 atas nama Muhammad Akhiruddin sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).	SITA
112	40 (Empat Puluh) plastik klip warna bening ukuran sedang merek Lips.	SITA
113	46 (Empat Puluh Enam) plastik klip warna bening ukuran kecil tanpa merek.	SITA
114	1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek 3QU4L7R3V.	SITA
115	1 (satu) unit handphone merek VIVO 1901 warna merah metalik dengan nomor imei 860991047132195 dan 860991047132187 yang didalamnya terpasang kartu telkomsel dengan nomor 085271469899.	SITA
116	2 (dua) buah sendok plastik yang terbuat dari pipet plastik.	SITA
117	1 (satu) unit handphone merek OPPO A15 warna hitam dengan nomor imei 867503056735975 dan 867503056735967 yang didalamnya terpasang kartu telkomsel dengan nomor 082285179354 dan 082297016073	SITA
118	1 (satu) buah foto timbangan yang diatasnya terdapat bungkus plastik warna hijau yang dibalut lakban warna hitam tanggal 10 agustus 2022 pukul 12.52 WIB terdapat di dalam handphone merek OPPO A15 warna hitam dengan nomor imei 867503056735975 dan 867503056735967.	SITA
119	Bukti transfer BRI tanggal 15 Juli 2022 pukul 10.43 WIB dengan nomor referensi 459985395677 dari PANIGORAN NATOGARDO kepada nomor rekening 036701080186505 atas nama MUHAMMAD AKHIRUDDIN sejumlah Rp. 50.000.000 Rupiah terdapat di dalam handphone merek OPPO A15 warna hitam dengan nomor imei 867503056735975 dan 867503056735967.	SITA
120	Bukti transfer BRI tanggal 15 Juli 2022 pukul 11.55 WIB dengan nomor referensi 459997422667 dari PANIGORAN NATOGARDO kepada nomor rekening 036701080186505 atas nama MUHAMMAD AKHIRUDDIN sejumlah Rp. 50.000.000 Rupiah terdapat di dalam handphone merek OPPO A15 warna hitam dengan nomor imei 867503056735975 dan 867503056735967.	SITA
121	Tanda bukti penyetoran Bank BRI tanggal 15 Juli 2022 pukul 10.38 WIB atas nama penyetor GUSNIATI kepada nomor rekening 036701080186505 atas nama MUHAMMAD AKHIRUDDIN sejumlah Rp. 100.000.000 Rupiah terdapat di dalam handphone merek OPPO A15 warna hitam dengan nomor imei 867503056735975 dan 867503056735967.	SITA
122	Bukti transfer BRI tanggal 15 Juli 2022 pukul 11.55 WIB dengan nomor referensi 459997422667 dari PANIGORAN NATOGARDO kepada nomor rekening 036701080186505 atas nama MUHAMMAD AKHIRUDDIN sejumlah	SITA

	Rp. 50.000.000 Rupiah terdapat di dalam handphone merek OPPO A15 warna hitam dengan nomor imei 867503056735975 dan 867503056735967.	
123	Tanda bukti penyetoran Bank BRI tanggal 15 Juli 2022 pukul 10.38 WIB atas nama penyetor GUSNIATI kepada nomor rekening 036701080186505 atas nama MUHAMMAD AKHIRUDDIN sejumlah Rp. 100.000.000 Rupiah terdapat di dalam handphone merek OPPO A15 warna hitam dengan nomor imei 867503056735975 dan 867503056735967.	SITA
124	Bukti transfer BRI tanggal 06 Agustus 2022 pukul 13.10 WIB dengan nomor referensi 463857539199 dari PANIGORAN NATOGARDO kepada nomor rekening 036701080186505 atas nama MUHAMMAD AKHIRUDDIN sejumlah Rp. 50.000.000 Rupiah terdapat di dalam handphone merek OPPO A15 warna hitam dengan nomor imei 867503056735975 dan 867503056735967.	SITA
125	1 (satu) buah Buku Simpedes BRI atas Nama PANIGORAN NATOGARDO dengan Nomor Rekening 545601025752537.	SITA
126	1 (satu) buah timbangan warna orange tanpa merek.	SITA
127	1 (satu) lembar print out screenshot foto timbangan yang diatasnya terdapat bungkus plastik warna hijau yang dibalut lakban warna hitam tanggal 10 agustus 2022 pukul 12.52 WIB yang terdapat di dalam handphone milik GUSNIATI Pgl SIGUS merek OPPO A15 warna hitam dengan nomor imei 867503056735975 dan 867503056735967	SITA
128	1 (satu) lembar print out screenshot bukti transfer BRI tanggal 15 Juli 2022 pukul 10.43 WIB dengan nomor referensi 459985395677 dari PANIGORAN NATOGARDO kepada nomor rekening 036701080186505 atas nama MUHAMMAD AKHIRUDDIN sejumlah Rp. 50.000.000 Rupiah yang terdapat di dalam handphone milik GUSNIATI Pgl SIGUS merek OPPO A15 warna hitam dengan nomor imei 867503056735975 dan 867503056735967.	SITA
129	1 (satu) lembar print out screenshot bukti transfer BRI tanggal 15 Juli 2022 pukul 11.55 WIB dengan nomor referensi 459997422667 dari PANIGORAN NATOGARDO kepada nomor rekening 036701080186505 atas nama MUHAMMAD AKHIRUDDIN sejumlah Rp. 50.000.000 Rupiah yang terdapat di dalam handphone milik GUSNIATI Pgl SIGUS merek OPPO A15 warna hitam dengan nomor imei 867503056735975 dan 867503056735967.	SITA
130	1 (satu) lembar print out screenshot tanda bukti penyetoran Bank BRI tanggal 15 Juli 2022 pukul 10.38 WIB atas nama penyetor GUSNIATI kepada nomor rekening 036701080186505 atas nama MUHAMMAD AKHIRUDDIN sejumlah Rp. 100.000.000 Rupiah yang terdapat di dalam handphone milik GUSNIATI Pgl SIGUS merek OPPO A15 warna hitam dengan nomor imei 867503056735975 dan 867503056735967.	SITA
131	1 (satu) lembar print out screenshot bukti transfer BRI tanggal 06 Agustus 2022 pukul 13.10 WIB dengan nomor referensi 463857539199 dari PANIGORAN NATOGARDO kepada nomor rekening 036701080186505 atas nama MUHAMMAD AKHIRUDDIN sejumlah Rp. 50.000.000 Rupiah yang terdapat di dalam handphone milik GUSNIATI Pgl SIGUS	SITA

	merek OPPO A15 warna hitam dengan nomor imei 867503056735975 dan 867503056735967.	
132	30 (tiga puluh) lembar kertas papir merek Narayana 734 warna putih garis kuning.	SITA
133	1 (satu) unit unit handphone merek Vivo 1612 warna putih dengan nomor IMEI 865228031949051 : 865228031949044 yang didalamnya terpasang nomor handphone 082169819008.	SITA
134	1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru merek Skaters Goods Denim.	SITA
135	1 (satu) buah kaleng merek gudang garam warna merah yang didalamnya terdapat biji Ganja.	SITA
136	1 (satu) buah kaleng merek gudang garam warna merah yang didalamnya terdapat :	SITA
137	6 (enam) buah manchis warna bening.	SITA
138	2 (dua) buah pipet plastik.	SITA
139	2 (dua) buah plastik klip warna bening.	SITA
140	1 (satu) buah plastik warna bening bekas sabu.	SITA
141	2 (dua) buah alat hisap sabu berupa bong yang terbuat dari botol plastik plastik warna bening.	SITA
142	1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi 4A warna gold dalam keadaan terbakar yang didalamnya terpasang nomor axis 083824255892.	SITA
143	1 (satu) helai Kaos lengan pendek warna abu-abu merek DENNDEV.	SITA
144	1 (satu) Buah Kotak Paket J&T yang dibalut dengan plastik warna hitam dengan Label J&T PDG-PSB03 An. pengirim RISKI, 628814016602,Bandung;Penerima ANI SUHAENI.	SITA
145	1 (satu) lembar kertas putih yang bertuliskan bahasa sunda "Hatur nuhun sing sehat. Ageng milikna Hampura teu Tiasa Seuer".	SITA
146	1 (satu) buah kotak kecil warna hitam merek pagoda	SITA
147	1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 warna hitam dengan nomor seri 1 355899531251219 dan seri 2 355899531351217 yang didalamnya terpasang nomor telkomsel 081378705665.	SITA
148	1 (satu) unit handphone merek Samsung SM-G313HZ warna putih dengan nomor imei 358936068936841 dan 358937068936849 yang didalamnya terpasang nomor indosat 085834032175.	SITA
149	1 (satu) helai jaket warna merah hitam merek 84 MR. SIMPLE.	SITA
150	Uang Tunai sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).	SITA
151	1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya masih terdapat sisa Sabu.	SITA
152	1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna bening.	SITA

153	1 (Satu) buah Jarum suntik bekas.	SITA
154	1 (Satu) set alat hisap sabu berupa bong yang terbuat dari botol minuman bekas warna putih biru.	SITA

Berdasarkan tabel diatas disimpulkan bahwa capaian untuk nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika adalah 100%. Hal ini dapat dilihat dari jumlah barang bukti yang diterima dari penyidik dengan yang dikeluarkan (dimusnahkan dan penyisihan) untuk kepentingan penyidikan adalah sama.

Faktor yang mendukung keberhasilan capaian target yaitu adanya kerjasama dengan stakeholder terkait. Namun permasalahan dalam pencapaian target saat ini belum adanya tempat penyimpanan yang memenuhi standar

Dalam mengatasi permasalahan tersebut langkah-langkah tindak lanjut yang dilakukan yaitu peningkatan Kelengkapan Sarana dan Prasarana untuk menjaga keamanan barang bukti.

11.	Sasaran : Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien
-----	---

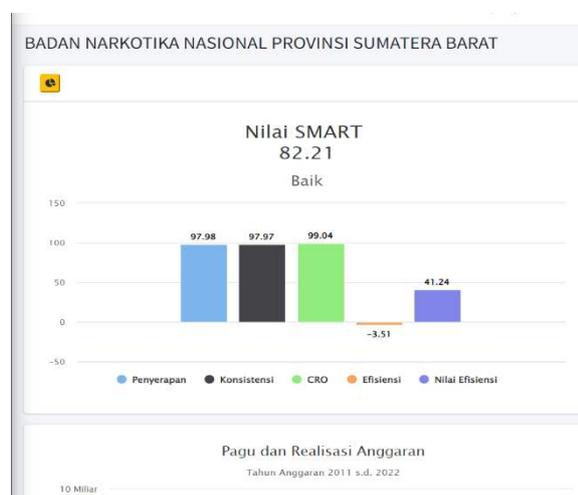
Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui 2 (dua) indikator kinerja sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Sumatera Barat	89 Indeks	82,21	92
2.	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	4 kabupaten/kota	1 kabupaten/kota	25

Nilai kinerja anggaran merupakan hasil penilaian yang diperoleh dari Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

Tabel 13.
Penghitungan Nilai Kinerja Anggaran BNNP Sumatera Barat TA. 2022

No	BNNP/BNNK	Nilai Kinerja Anggaran (Capaian Aplikasi Smart Kemenkeu per 31 Des 2022)
1	BNNP Sumbar	82,21
2	BNN Kota Payakumbuh	87,45
3	BNN Kota Sawahlunto	80,73
4	BNN Kabupaten Solok	84,48
5	BNN Kabupaten Pasaman Barat	82,21



Penilaian nilai kinerja pada aplikasi Smartkemenkeu BNNP terdiri dari :

1. Capaian RO : 43,5 %
2. Efisiensi : 28,6 %
3. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan : 18,2 %
4. Penyerapan anggaran : 9,7 %

Dari penghitungan tabel diatas maka capaian akhir nilai kinerja anggaran BNNP Sumatera Barat adalah:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Akhir} &= \frac{\text{Total Nilai Kinerja Anggaran BNNP dan BNNK}}{\text{Jumlah BNNP dan BNNK}} \\
 &= \frac{82,21 + 87,45 + 80,73 + 84,48 + 82,21}{5} \\
 &= 83,41
 \end{aligned}$$

Dari hasil hitung diatas maka nilai kinerja anggaran BNNP Sumatera Barat adalah 83,41.

Adapun yang menjadi kendala tidak tercapainya nilai kinerja pada BNNP Sumatera Barat dan BNNKab/Kota adalah belum memahami sepenuhnya penilaian indikator efisiensi pada Aplikasi Smartkemenkeu serta optimalisasi anggaran sehingga beberapa anggaran dari kegiatan dialihkan untuk realokasi COVID-19.

Dapat disimpulkan pada indikator Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target pada BNNP Sumatera Barat tidak tercapai untuk tahun 2022 ini.

12.	Sasaran : Meningkatnya tata Kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur
------------	--

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui 2 (dua) indikator kinerja sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Sumatera Barat	95 Indeks	97,06	102
2.	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	4 kabupaten/kota	4 kabupaten/kota	100

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2022 adalah 97,06 dengan target 95. Nilai Indikator Kinerja tersebut diperoleh dari Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran Satker pada Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OM-SPAN). Maka capaian target IKPA BNN Provinsi Sumatera Barat adalah 102 %.

Sedangkan untuk jumlah BNN Kabupaten / Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target sebanyak 4 kabupaten/kota, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 14.
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Sumatera Barat dan BNNKab/kota Tahun 2022

No	BNNP/BNNK	Nilai IKPA (<i>Capaian Aplikasi Smart Kemenkeu per 31 Des 2022</i>)
1	BNNP Sumbar	97,06
2	BNN Kota Payakumbuh	99,56
3	BNN Kota Sawahlunto	96,01
4	BNN Kabupaten Solok	98,45
5	BNN Kabupaten Pasaman Barat	97,30

Langkah yang dilakukan untuk meningkatkan Kinerja sebagai berikut :

- a. Peningkatan koordinasi, pembinaan teknis dan kerja sama dengan seluruh instansi pemerintah, swasta, organisasi masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pelaksanaan P4GN.
- b. Peningkatan kualitas SDM baik struktural maupun fungsional melalui pelatihan/diklat.
- c. Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 15.293.290.000,- pada tahun 2022 yang berasal dari dana APBN.

Tabel 15.
Alokasi Anggaran BNNP Sumatera Barat TA. 2022

NO.	JENIS BELANJA	PAGU PER JENIS BELANJA	REALISASI TAHUN 2022	SISA ANGGARAN
1.	Belanja Pegawai	3.916.770.000	3.858.523.622	58.246.378
2.	Belanja Barang	11.253.559.000	11.060.237.431	193.321.569
3.	Belanja Modal	122.961.000	122.006.872	954.128
TOTAL		15.293.290.000	15.040.767.925	252.522.075

Dari tabel di atas dapat diketahui realisasi anggaran BNNP Sumatera Barat tahun 2022 guna mendukung program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di daerah adalah sebesar Rp.15.040.767.925,- atau sebesar 98,34 % dari total anggaran.

Jika dilihat dari sumber dana alokasi anggaran BNNP Sumatera Barat Tahun 2022 adalah :

Tabel 16.
Alokasi Anggaran BNNP Sumatera Barat TA. 2022 Berdasarkan Sumber Dana

NO.	SUMBER DANA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2022	SISA ANGGARAN
1.	APBN	15.243.290.000	14.990.767.925	252.522.075
2.	HIBAH	50.000.000	50.000.000	-

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, kebijakan, program dan kegiatan dengan harapan dapat berperan sebagai alat kendalai guna mengetahui kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*). Secara umum dapat disimpulkan bahwa BNN Provinsi Sumatera Barat telah dapat merealisasikan berbagai kegiatan melalui Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba sebagaimana yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja tahun 2021.

Capaian Kinerja BNNP Sumatera Barat tahun 2022 merupakan sinergitas kinerja dari Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Rehabilitasi dan Bidang Pemberantasan serta Bagian Umum yang berpengaruh terhadap capaian keberhasilan tugas BNNP Sumatera Barat dalam menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks di Bidang P4GN.

- a. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
 - Jumlah kabupaten / kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah Provinsi , target 4 kab/kota tercapai 4 kab/kota;
 - Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah Provinsi, target 4 kab/kota tercapai 4 kab/kota;
 - Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah Provinsi, target 4 kab/kota tercapai 3 kab/kota;
 - Jumlah Kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari “bahaya” menjadi “waspada”, target 1 kawasan tercapai 1 kawasan;
 - Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi, target 2,6 Indeks tercapai 2,85 Indeks

- b. Bidang Rehabilitasi terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
- Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih, target 28 orang tercapai 31 orang;
 - Jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis, target 5 orang tercapai N/A
 - Jumlah Lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi, target 1 lembaga tercapai 1 lembaga;
 - Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi target 6 Unit tercapai 6 Unit;
 - Indeks Kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Sumatera Barat, target 3,2 tercapai 3,327.
- c. Bidang Pemberantasan terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
- Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21 target 17 berkas perkara tercapai 32 berkas perkara.
 - Nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan, target 100 tercapai 100.
 - Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba, target 100 tercapai 100.
- d. Bagian Umum terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
- Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Sumatera Barat , target 89 tercapai 82, 21;
 - Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target, target 4 kabupaten/kota , tercapai 1 kabupaten/kota. 3 kabupaten/kota dengan hasil tidak tercapai dikarenakan ada beberapa output yang tidak tercapai;
 - Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Sumatera Barat target 95 Indeks tercapai 97,06;
 - Jumlah BNN Kabupaten /Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target, target 4 kabupaten/kota tercapai 4 kabupaten/kota.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang telah dilakukan oleh BNN Provinsi Sumatera Barat sepanjang tahun 2022 bagi masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan. Capaian kinerja BNN Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, telah dilakukan dengan upaya yang optimal dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat guna mensukseskan program P4GN di daerah. **Speed Up Never let Up.**

Padang, Januari 2023
**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI SUMATERA BARAT**



Drs. SUKRIA GAOS, MM
BRIGADIR JENDERAL POLISI



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA
BARAT
TAHUN 2022**

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. KHASRIL

Jabatan : KEPALA BNN PROVINSI SUMATERA BARAT

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. PETRUS R. GOLOSE

Jabatan : KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
**KEPALA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL**


Dr. PETRUS R. GOLOSE

Bogor, 07 Maret 2022
Pihak Pertama,
**KEPALA BNN PROVINSI
SUMATERA BARAT**


Drs. KHASRIL

14. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Rp.6.313.220.000
15. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan Rp.140.000.000

Pihak Kedua,
KEPALA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL



Dr. PETRUS R. GOLOSE

Bogor, 07 Maret 2022
Pihak Pertama,
KEPALA BNN PROVINSI
SUMATERA BARAT



Drs. KHASRIL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA
BARAT

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	4 Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	4 Kabupaten/Kota
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	4 Kabupaten/Kota
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1 Kawasan
5	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	2,6 Indeks
6	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	25 Orang
7	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	5 Orang
8	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi	1 Lembaga
9	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi	6 Unit

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
10	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi	3.2 Indeks
11	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21	17 Berkas Perkara
12	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban, dan Kesehatan Tahanan	100 Indeks
13	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100 Indeks
14	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	89 Indeks
15	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan NKA mencapai target	4 Kabupaten/Kota
16	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95 Indeks
17	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	4 Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi Rp.402.000.000
2. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi Rp.615.000.000
3. Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat Rp.1.039.700.000
4. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif Rp.154.174.000
5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah Rp.230.115.000
6. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat Rp.717.898.000
7. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba Rp.87.150.000
8. Kegiatan Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi Rp.50.000.000
9. Kegiatan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika Rp.1.180.000.000
10. Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti Rp.335.660.000
11. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Rp.4.012.842.000
12. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia Rp.122.120.000
13. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN Rp.170.816.000



PERJANJIAN KINERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2022

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. FEBRIAN JUFRIL, SE, M.SI
Jabatan : KEPALA BNN KOTA PAYAKUMBUH

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. KHASRIL
Jabatan : KEPALA BNNP SUMATERA BARAT

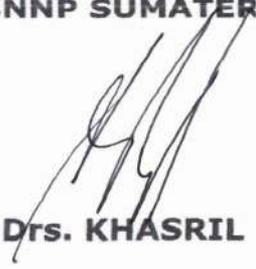
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

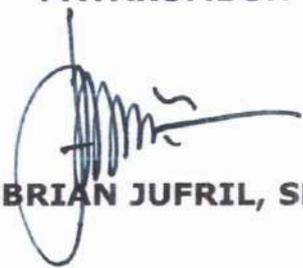
KEPALA BNNP SUMATERA BARAT


Drs. KHASRIL

Padang, 15 Maret 2022

Pihak Pertama,

**KEPALA BNN KOTA
PAYAKUMBUH**


M. FEBRIAN JUFRIL, SE, M.SI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PAYAKUMBUH**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Anak dan Remaja	51 Indeks
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Faktor Risiko Penyalahgunaan Narkoba	78,8 Indeks
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,2 Indeks
4	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	2 Lembaga
5	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	1 Unit
6	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi	3,2 Indeks
7	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	2 Berkas Perkara
8	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	87 Indeks
9	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95 Indeks

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp.77.000.000
2. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp.123.000.000
3. Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Rp.194.300.000
4. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp.8.900.000
5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp.122.025.000
6. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp.7.000.000
7. Kegiatan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap	Rp.71.052.000

Narkotika	
8. Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Rp.27.475.000
9. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp.125.812.000
10. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp.18.860.000
11. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp.32.260.000
12. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Rp.1.046.465.000
13. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp.20.000.000

Pihak Kedua,

KEPALA BNNP SUMATERA BARAT


Drs. KHASRIL

Padang, 15 Maret 2022

Pihak Pertama,

**KEPALA BNN KOTA
PAYAKUMBUH**


M. FEBRIAN JUFRI, SE, M.SI



PERJANJIAN KINERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2022

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ERLIS, S.E., M.H.

Jabatan : KEPALA BNN KOTA SAWAHLUNTO

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. KHASRIL

Jabatan : KEPALA BNN SUMATERA BARAT

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, 15 Maret 2022

Pihak Kedua,

KEPALA BNNP SUMATERA BARAT

Drs. KHASRIL

**KEPALA BNN KOTA
SAWAHLUNTO**

ERLIS, S.E., M.H.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA SAWAHLUNTO**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	52 Indeks
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	76,51 Indeks
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,20 Indeks
4	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	2 Lembaga
5	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	1 Unit
6	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi	3,2 Indeks
7	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	2 Berkas Perkara
8	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	87 Indeks
9	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (JKPA)	95 Indeks

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi Rp.74.000.000
2. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi Rp.119.000.000
3. Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat Rp.194.300.000
4. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba Rp.15.400.000
5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah Rp.10.150.000
6. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat Rp.92.925.000
7. Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti Rp.15.700.000

- | | |
|---|------------------|
| 8. Kegiatan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika | Rp.71.052.000 |
| 9. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan | Rp.132.749.000 |
| 10. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia | Rp.19.108.000 |
| 11. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN | Rp.32.060.000 |
| 12. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana | Rp.1.133.182.000 |
| 13. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolalan | Rp.20.000.000 |

Pihak Kedua,

KEPALA BNNP SUMATERA BARAT



Drs. KHASRIL

Padang, 15 Maret 2022

Pihak Pertama,

**KEPALA BNN KOTA
SAWAHLUNTO**



ERLIS S.E., M.H.



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SOLOK
TAHUN 2022**

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SAIFUDDIN ANSHORI, S.I.K.
Jabatan : KEPALA BNN KAB SOLOK

selanjutnya disebut pihak pertama

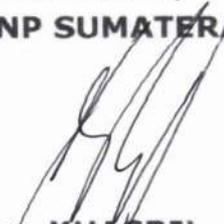
Nama : Drs. KHASRIL
Jabatan : KEPALA BNNP SUMATERA BARAT

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KEPALA BNNP SUMATERA BARAT


Drs. KHASRIL

Padang, 15 Maret 2022
Pihak Pertama,
KEPALA BNN KAB SOLOK


SAIFUDDIN ANSHORI, S.I.K.

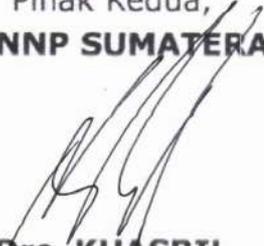
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SOLOK**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Anak dan Remaja	51.00 Indeks
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Faktor Risiko Penyalahgunaan Narkoba	78.80 Indeks
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Masyarakat	3.10 Indeks
4	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	3 Lembaga
5	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	1 Unit
6	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan rehabilitasi narkotika	3.2 Indeks
7	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21	2 Berkas Perkara
8	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	87 Indeks
9	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95 Indeks

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp.77.000.000
2. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp.123.000.000
3. Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Rp.194.300.000
4. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp.11.350.000
5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp.116.880.000
6. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp.8.400.000

7. Kegiatan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	Rp.71.052.000
8. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp.108.329.000
9. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp.19.480.000
10. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp.31.960.000
11. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Rp.939.702.000
12. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp.20.000.000

Pihak Kedua,
KEPALA BNNP SUMATERA BARAT


Drs. KHASRIL

Padang, 15 Maret 2022
Pihak Pertama,
KEPALA BNN KAB SOLOK


SAIFUDDIN ANSHORI, S.I.K.



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN PASAMAN
BARAT
TAHUN 2022**

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : IRWAN EFFENRY, AM, S.H., M.M
Jabatan : KEPALA BNN KAB PASAMAN BARAT

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. KHASRIL
Jabatan : KEPALA BNNP SUMATERA BARAT

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PADANG, 15 Maret 2022

Pihak Kedua,
KEPALA BNNP SUMATERA BARAT


Drs. KHASRIL

Pihak Pertama,
**KEPALA BNN KAB PASAMAN
BARAT**


IRWAN EFFENRY, AM, S.H., M.M

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN PASAMAN
BARAT**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Anak dan Remaja	51 Indeks
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Faktor Risiko Penyalahgunaan Narkotika	79 Indeks
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Masyarakat	3,20 Indeks
4	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	2 Lembaga
5	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	1 Unit
6	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi	3,2 Indeks
7	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	5 Orang
8	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21	2 Berkas Perkara
9	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	90 Indeks
10	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95 Indeks

- | | |
|--|----------------|
| 1. Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat | Rp.194.300.000 |
| 2. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi | Rp.74.000.000 |
| 3. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi | Rp.119.000.000 |
| 4. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah | Rp.9.650.000 |
| 5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat | Rp.96.252.000 |

6. Kegiatan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	Rp.71.052.000
7. Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Rp.19.625.000
8. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp.122.499.000
9. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp.17.832.000
10. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp.32.600.000
11. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Rp.895.871.000
12. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp.20.000.000
13. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp.18.000.000

Pihak Kedua,

KEPALA BNNP SUMATERA BARAT


Drs. KHASRIL

PADANG, 15 Maret 2022

Pihak Pertama,

**KEPALA BNN KAB PASAMAN
BARAT**


IRWAN EFFENRY, AM, S.H., M.M